



DOI: <https://doi.org/10.38035/jhesm.v4i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Efektivitas Penerapan Sistem Digital dalam Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan BUMDes Karya Maju Cemerlang Kalimantan Utara

Putri Nursela Setiawati¹, Adhita Arief Setyawan²

¹Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Piki Ganesha, Indonesia, puttynursela@gmail.com

²Bisnis Digital, Politeknik Piki Ganesha, Indonesia, adhitammsi@gmail.com

Corresponding Author: puttynursela@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the effectiveness of digital system implementation in supporting the transparency and performance accountability of the management of BUMDes Karya Maju Cemerlang in Apung Village, Tanjung Selor District, Bulungan Regency, North Kalimantan. This research utilized a qualitative approach with a descriptive method. The digital system examined includes the use of Microsoft Excel applications. Informants were selected using a purposive sampling technique, involving 2 (two) key informants: the BUMDes Director and the Financial Treasurer. Data collection was conducted through participatory observation, semi-structured interviews, and documentation analysis from 2024 to 2026. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, while data validity was ensured through source triangulation, technique triangulation, and member checking. The results indicate that the implementation of the digital system is assessed to help improve administrative efficiency, accelerate the preparation of financial and operational reports, minimize manual recording errors (human error), and facilitate oversight mechanisms. The utilization of digital records also contributes to strengthening accountability and internal operational transparency. However, its implementation remains sub-optimal due to constraints such as delayed daily data entry, limited human resource (HR) digital literacy, and the absence of public transparency caused by a lack of online platforms to publish performance reports. Therefore, it is necessary to develop Standard Operating Procedures (SOPs) for routine recording, schedule technical training, implement data backups, and provide integrated information media to achieve professional, transparent, and accountable BUMDes governance.*

Keyword: *Digital System, Organizational Effectiveness, Transparency, Accountability, BUMDes.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem digital dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja pengurus BUMDes Karya Maju Cemerlang di Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sistem digital yang diteliti mencakup penggunaan aplikasi Microsoft Excel. Pemilihan informan

dilakukan melalui teknik purposive sampling yang melibatkan 2 (dua) orang informan kunci, yakni Direktur BUMDes dan Bendahara Keuangan. Pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, serta studi dokumentasi periode 2024–2026. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, sementara keabsahan data diuji melalui prosedur triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem digital dinilai membantu meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat penyusunan laporan operasional dan keuangan, meminimalisasi kesalahan pencatatan manual (human error), serta mempermudah mekanisme pengawasan. Pemanfaatan rekam jejak digital juga memberikan kontribusi dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi operasional di ranah internal. Meskipun demikian, implementasinya belum berjalan optimal akibat kendala penundaan entri data harian, keterbatasan literasi digital sumber daya manusia (SDM), serta belum terwujudnya transparansi publik karena ketiadaan platform daring untuk memublikasikan laporan kinerja. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pencatatan rutin, penjadwalan pelatihan teknis, pencadangan data, serta penyediaan media informasi terintegrasi guna mewujudkan tata kelola BUMDes yang profesional, transparan, dan akuntabel

Kata Kunci: Sistem Digital, Efektivitas Organisasi, Transparansi, Akuntabilitas, BUMDes

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis sebagai penggerak aktivitas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang mengandalkan potensi lokal (Zulpan dkk., 2025). Agar tujuan organisasi ini dapat tercapai secara optimal, pengelolaan BUMDes menuntut tingkat efektivitas yang tinggi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Efektivitas pengelolaan ini sangat bergantung pada penerapan prinsip transparansi, yakni keterbukaan informasi yang jujur kepada masyarakat, serta akuntabilitas, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pengurus atas seluruh kegiatan usaha. Semakin tinggi tingkat transparansi dan akuntabilitas, maka semakin baik pula kinerja organisasi yang dihasilkan (Aprillianto dkk., 2022)

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penerapan sistem digital menjadi solusi krusial untuk mengoptimalkan tata kelola dan efektivitas BUMDes (Setiawati dkk., 2026). Pencatatan yang terdigitalisasi dapat memfasilitasi pengelolaan rekaman operasional secara akurat, salah satunya adalah pendataan jumlah pengunjung. Meskipun jumlah pengunjung pada dasarnya merupakan indikator aktivitas operasional, ketersediaan dan keterbukaan data ini menjadi langkah awal (proxy) yang krusial dalam membangun transparansi. Dengan adanya pencatatan digital yang dapat diakses, proses operasional menjadi tidak lagi tertutup dan lebih terukur (Dewi & Yasa, 2025). Lebih lanjut, data pengunjung ini dapat menjadi data pendukung awal dalam mengestimasi potensi aktivitas usaha, meskipun untuk memverifikasi kewajaran pendapatan aktual secara komprehensif tetap memerlukan analisis lanjutan yang membandingkan besaran tarif dan penerimaan riil.

Sebagai wujud implementasi tata kelola tersebut, BUMDes Karya Maju Cemerlang yang berlokasi di Desa Apung, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, telah mulai merekam jejak fluktuasi jumlah kunjungan masyarakat pada unit usahanya secara digital. Berdasarkan data awal rekapitulasi pengunjung periode 2024 hingga awal 2026, terlihat adanya dinamika operasional yang cukup jelas. Terdapat bulan-bulan dengan lonjakan pengunjung yang sangat drastis, namun di sisi lain terdapat pula tren kontraksi kunjungan selama beberapa periode berturut-turut. Fluktuasi data operasional ini menjadi fenomena awal yang mengindikasikan perlunya atensi khusus dan evaluasi strategi manajerial oleh pengurus BUMDes.

Meskipun pencatatan data mulai dipraktikkan, implementasi sistem digital secara menyeluruh di BUMDes Karya Maju Cemerlang masih terhambat oleh sejumlah kendala

mendasar, seperti keterbatasan literasi digital pada sumber daya manusia dan proses administrasi yang belum terintegrasi. Kondisi ini menyoroti adanya research gap apabila disintesis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Studi dari Pratiwi dan Sujana (2024) membuktikan bahwa sistem informasi akuntansi mampu meningkatkan efisiensi administrasi laporan keuangan BUMDes. Sejalan dengan itu, Dewi dan Yasa (2025) menemukan bahwa pencatatan digital membuat proses operasional lebih terukur dan menjadi landasan pertanggungjawaban.

Di sisi lain, Salindeho dkk. (2026) menegaskan bahwa infrastruktur teknologi akan gagal tanpa pelatihan SDM yang konsisten akibat rendahnya literasi digital. Ketiga studi tersebut memiliki kesamaan, yakni sama-sama menitikberatkan evaluasi pada digitalisasi hasil akhir berupa laporan keuangan. Masih terbatas penelitian yang secara spesifik menyoroti dan memposisikan transisi pencatatan data operasional awal seperti rekam jejak pengunjung sebagai instrumen proksi untuk menjembatani celah transparansi dan akuntabilitas di BUMDes rintisan yang masih beradaptasi dengan keterbatasan kompetensi SDM.

Oleh karena itu, penelitian pada BUMDes Karya Maju Cemerlang menjadi sangat krusial guna mengisi ruang kosong tersebut dan melihat realitas transisi digitalisasi operasional secara lebih mendalam. Merespons kondisi tersebut, perbaikan tata kelola operasional berbasis teknologi menjadi sebuah keharusan guna memenuhi tuntutan institusional akuntabilitas BUMDes di era digital (Sadiyah & Ibrahim, 2026). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem digital dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja pengurus BUMDes Karya Maju Cemerlang.

Kebaruan (novelty) dari penelitian ini dinyatakan secara eksplisit pada fokus kajian yang menempatkan digitalisasi data operasional awal seperti rekam jejak pengunjung sebagai instrumen proksi untuk menilai efektivitas pembentukan transparansi dan akuntabilitas BUMDes, alih-alih hanya berfokus pada hasil akhir laporan keuangan seperti pada penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru terkait dinamika digitalisasi tata kelola organisasi di tingkat perdesaan sekaligus membantu pengurus menyempurnakan manajemen usahanya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

BUMDes adalah lembaga berbadan hukum yang didirikan desa untuk mengelola potensi lokal guna meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (PP No. 11 Tahun 2021). Keberhasilan BUMDes tidak hanya diukur dari profit, tetapi juga dari tata kelola administrasi, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban pengurus. Penelitian ini berfokus pada BUMDes Karya Maju Cemerlang untuk mengevaluasi peran sistem digital dalam meningkatkan kualitas tata kelola tersebut.

Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dan efisien (Siagian, 2001). Berkaitan dengan pengukurannya, menurut Steers (sebagaimana dikutip dalam Nayanti dkk., 2025), efektivitas dibagi ke dalam tiga indikator utama, yaitu: (1) pencapaian tujuan, (2) integrasi (koordinasi antaranggota), dan (3) adaptasi terhadap perubahan teknologi. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas diukur dari sejauh mana kemampuan sistem digital dapat mempermudah pengurus dalam melakukan pencatatan, pelaporan, dan pengawasan operasional BUMDes.

Sistem Digital dalam Pengelolaan Organisasi

Menurut Laudon dan Laudon (2020, sebagaimana dikutip dalam Pratiwi & Sujana, 2024), sistem digital merupakan infrastruktur berbasis teknologi informasi yang berfungsi memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data guna menunjang pengambilan keputusan strategis dalam organisasi. Dalam konteks tata kelola BUMDes, Pemanfaatan sistem ini membantu

mengefisienkan administrasi operasional dan keuangan, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan manual (human error). serta mempercepat penyajian informasi yang akurat bagi para pemangku kepentingan.

Secara spesifik, sistem digital yang diteliti pada BUMDes Karya Maju Cemerlang meliputi penggunaan aplikasi Microsoft Excel yang mulai diimplementasikan sejak awal tahun 2025. Sistem ini memiliki fungsi utama untuk mencatat transaksi harian jual beli, mengelola arus pendapatan dan pengeluaran, serta merekap data pengunjung. Pengguna utama (user) dari sistem ini adalah Bendahara Keuangan dan Direktur BUMDes, dengan jenis data yang dicatat mencakup data pemasukan unit usaha, pengeluaran operasional, dan riwayat kunjungan. Sebelum adanya digitalisasi, proses kerja administrasi di BUMDes dilakukan secara manual menggunakan buku kas besar dan nota fisik yang memakan waktu lama dalam perekapan serta rentan mengalami kerusakan atau hilang. Setelah digitalisasi menggunakan perangkat lunak tersebut diterapkan, proses kerja menjadi lebih ringkas di mana entri data langsung tersimpan secara terkomputerisasi dan laporan dapat disusun dengan lebih cepat dan akurat.

Teori Transparansi

Menurut Mardiasmo (sebagaimana dikutip dalam Mais dkk., 2024)), transparansi merupakan prinsip keterbukaan organisasi dalam mengelola sumber daya publik sehingga informasi tersebut mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam konteks BUMDes, penerapan sistem digital sangat mendukung terwujudnya prinsip ini karena teknologi mampu menyediakan rekam jejak digital (digital record) seperti dokumen pelaporan keuangan dan rekapitulasi data pengunjung yang valid, terbuka, serta dapat diverifikasi akurasi kapan saja.

Teori Akuntabilitas

Kinerja Pengurus BUMDes

Menurut Mahmudi (sebagaimana dikutip dalam Mais dkk., 2024), akuntabilitas merupakan kewajiban suatu organisasi untuk menyajikan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas pengelolaannya kepada pihak yang memiliki kewenangan. Dalam konteks BUMDes pada kajian ini, akuntabilitas difokuskan ke dalam dua aspek utama, yaitu: akuntabilitas keuangan (kepatuhan penggunaan dana) serta akuntabilitas administratif (pengelolaan arsip secara sistematis). Implementasi sistem digital berperan penting dalam memperkuat kedua aspek tersebut dengan memastikan bahwa seluruh data operasional tercatat secara akurat dan mudah ditelusuri kembali saat proses evaluasi maupun audit

Kinerja merupakan kualitas dan kuantitas hasil kerja individu sesuai tanggung jawabnya, menurut Mangkunegara (sebagaimana dikutip dalam Sriyanto & Widiyahseno, 2025). Kehadiran sistem digital mendorong peningkatan kinerja pengurus BUMDes melalui ketersediaan informasi yang cepat, akurat, dan memadai untuk evaluasi serta pengambilan keputusan.

Fokus dan Indikator Penelitian

Untuk memperjelas hubungan antara landasan teori, pertanyaan wawancara, dan hasil penelitian, fokus kajian ini dijabarkan melalui matriks indikator pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Fokus dan Indikator Penelitian

Konsep	Indikator	Sumber Teori	Data yang Dibutuhkan	Informan
--------	-----------	--------------	----------------------	----------

Efektivitas Sistem Digital	Pencapaian tujuan administrasi Kemudahan integrasi data Adaptasi teknologi oleh SDM	Steers (dalam Nayanti dkk., 2025)	Proses kerja sebelum dan sesudah digitalisasi, kendala operasional, tingkat kesalahan pencatatan (human error).	Pengelola BUMDes, Staf Keuangan
Transparansi Kinerja	Ketersediaan rekam jejak digital Keterbukaan & kemudahan akses informasi	Mardiasmo (dalam Mais dkk., 2024)	Rekapitulasi data pengunjung, dokumen pelaporan publik, mekanisme permintaan data operasional.	Pengelola BUMDes, Staf Keuangan
Akuntabilitas Administratif dan Keuangan	Akuntabilitas Keuangan 3. Akuntabilitas Administratif	Mahmudi (dalam Mais dkk., 2024)	Bukti transaksi digital, evaluasi kesesuaian pendapatan, dokumen pemeriksaan pengawas.	Pengelola BUMDes, Staf Keuangan

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengkaji secara mendalam implementasi sistem digital di BUMDes Karya Maju Cemerlang, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Pelaksanaan penelitian dan wawancara lapangan dilakukan pada periode Mei hingga Juli 2026. Mengingat narasumber yang dapat diakses difokuskan pada pengelola utama, batasan evaluasi transparansi pada penelitian ini dikhususkan pada transparansi internal operasional organisasi. Penentuan informan dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria informan meliputi: memiliki masa kerja dan keterlibatan langsung di BUMDes minimal satu tahun, bertindak sebagai pengguna langsung (user) sistem digital (Microsoft Excel) yang mulai diimplementasikan pada awal tahun 2025, serta memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh terhadap penyusunan laporan keuangan maupun operasional. Berdasarkan kriteria tersebut, ditetapkan jumlah informan secara pasti sebanyak dua orang, yaitu Direktur BUMDes dan Bendahara Keuangan BUMDes.

Pengumpulan data difokuskan pada evaluasi tiga tema utama, yakni efektivitas sistem digital, transparansi internal, dan akuntabilitas. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur kepada kedua informan, serta studi dokumentasi berupa data rekapitulasi operasional dan riwayat kunjungan periode 2024–2026. Terkait dokumen tahun 2024, data tersebut pada awalnya merupakan hasil pencatatan manual yang kemudian direkapitulasi dan diintegrasikan (migrasi data) ke dalam sistem digital secara resmi pada awal tahun 2025. Penjelasan status rekaman ini penting untuk memastikan validitas dalam melakukan komparasi data antarperiode operasional, baik sebelum maupun sesudah transisi digitalisasi diterapkan secara penuh.

Teknik analisis data dalam penelitian ini merujuk pada model interaktif Miles dan Huberman yang dijalankan melalui tiga tahapan terintegrasi. Tahap pertama adalah reduksi data, di mana peneliti melakukan transkripsi hasil wawancara, menyortir, dan mengodekan (coding) informasi yang relevan ke dalam tiga tema utama sesuai fokus penelitian, yaitu indikator efektivitas dan kendala sistem, praktik transparansi internal, serta pembuktian

akuntabilitas transaksi. Tahap kedua adalah penyajian data (data display) yang diwujudkan dalam bentuk teks naratif deskriptif dan tabel matriks agar pola hubungan informasi lebih mudah dipahami. Tahap ketiga berupa penarikan kesimpulan awal yang kemudian diverifikasi terus-menerus dengan temuan di lapangan. Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan prosedur triangulasi sumber dengan membandingkan kebenaran informasi antara Direktur dan Bendahara, triangulasi teknik dengan mencocokkan hasil wawancara terhadap observasi dan bukti dokumen di sistem, serta member checking dengan meminta konfirmasi kembali kepada informan terkait transkrip wawancara untuk mencegah misinterpretasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem digital dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja BUMDes Karya Maju Cemerlang. Pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan pertanyaan terbuka kepada pihak-pihak terkait.

Hasil Temuan Wawancara

Penelitian ini menganalisis implementasi sistem digital yang mencakup penggunaan aplikasi Microsoft Excel pada BUMDes Karya Maju Cemerlang. Sistem ini mulai diterapkan pada awal tahun 2025 dengan tujuan utama mendigitalisasi pencatatan transaksi harian dan rekapan data pengunjung. Pengumpulan data utama dilakukan melalui wawancara mendalam dengan dua informan kunci, yakni Bapak Muhammad Zakaria selaku Direktur BUMDes dan Saudari Maria Omia selaku Bendahara Keuangan, yang didukung oleh observasi dan studi dokumen operasional.

Sebagai bukti konkret dari penerapan pencatatan berbasis digital, peneliti memperoleh dokumen keluaran berupa data rekapitulasi pengunjung. Perlu dipertegas bahwa fungsi penyajian Tabel 2 ini murni sebagai contoh keluaran (output) dari pencatatan sistem digital. Fluktuasi jumlah pengunjung yang tersaji merupakan indikator aktivitas operasional unit usaha, bukan merupakan indikator langsung efektivitas sistem digital. Oleh karena itu, data perubahan persentase pengunjung tersebut sama sekali tidak boleh ditafsirkan sebagai akibat atau dampak dari penerapan sistem digital itu sendiri. Rincian data operasional pengunjung dari masa transisi manual ke digital tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data Pengunjung Periode 2024–2026

Bulan	Jumlah Pengunjung (2024)	Jumlah Pengunjung (2025)	Jumlah Pengunjung (2026)	Persentase Perubahan 2024 Ke 2025 (%)	Persentase Perubahan 2025 Ke 2026 (%)
Januari	40	12	31	-70,00%	158,33%
April	50	21	10	-58,00%	-52,38%
Mei	20	6	18	-70,00%	200,00%
Juni	14	10	12	-28,57%	20,00%
Juli	12	15	23	25,00%	53,33%
Oktober	33	25	21	-24,24%	-16,00%

Sumber: Data Dokumen BUMDes (Diolah, 2026)

Efektivitas Administrasi Sistem Digital

Penerapan sistem digital menunjukkan perbandingan kondisi operasional yang sangat kontras antara sebelum dan sesudah digitalisasi. Untuk menjawab tujuan penelitian terkait tingkat efektivitas sistem digital dalam membantu administrasi BUMDes, peneliti menyusun matriks pembuktian data komparatif. Matriks ini disusun berdasarkan hasil observasi dokumen

dan wawancara terkait waktu penyusunan laporan, tingkat kesalahan, hingga waktu pencarian bukti transaksi. Rincian perbandingan operasional tersebut disajikan pada Tabel 3 berikut

Tabel 3. Komparasi Operasional Sebelum dan Sesudah Digitalisasi

Indikator Evaluasi	Sebelum Digitalisasi (Tahun 2024 - Manual)	Sesudah Digitalisasi (Tahun 2025–2026 - Excel)
1. Waktu penyusunan laporan	Membutuhkan 3 hingga 4 hari kerja.	Membutuhkan 0,5 hari kerja (setengah hari).
2. Jumlah kesalahan pencatatan	Sering terjadi (human error seperti salah hitung nominal atau pencatatan pengeluaran ganda).	Sangat minim (terkontrol oleh otomatisasi rumus formula Excel).
3. Jumlah transaksi yang terlambat dimasukkan	Tidak relevan (langsung dicatat secara manual menggunakan pena di buku kas).	Sering terjadi keterlambatan entri (menumpuk hingga 2–3 hari), khususnya saat beban operasional akhir pekan tinggi.
4. Kelengkapan dokumen	Rawan tidak lengkap (nota fisik rentan terselip, pudar, atau hilang).	Lengkap (nota fisik didukung oleh arsip cadangan berupa foto digital di dalam folder).
5. Waktu pencarian bukti transaksi	Sangat lama (harus membongkar tumpukan kardus arsip fisik tahun-tahun sebelumnya).	Sangat cepat (mudah dan praktis ditelusuri menggunakan fitur pencarian nama/tanggal file di komputer).

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Merujuk pada Tabel 3, efektivitas administrasi terbukti mengalami perbaikan. Menurut informan, sebelum awal 2025, pencatatan dilakukan di buku kas besar, sehingga proses pencarian bukti transaksi (nota) dan pembuatan laporan akhir bulan memakan waktu yang sangat lama. Setelah penerapan Microsoft Excel, sistem ini membantu mengurangi tingkat kesalahan pencatatan dasar, seperti salah hitung. Hal ini didukung oleh pernyataan Bendahara Keuangan: "Dulu kalau mau bikin laporan bulanan, saya butuh waktu sampai tiga atau empat hari hanya untuk merekap nota fisik yang kadang terselip. Sekarang karena data langsung dimasukkan ke Excel setiap hari, laporan tinggal difilter dan ditarik, setengah hari juga sudah selesai dan siap dilaporkan," ungkap Saudari Maria Omia. Keberadaan folder digital juga secara langsung memangkas waktu pencarian bukti dokumen dari yang sebelumnya memakan waktu lama akibat harus membongkar kardus arsip, menjadi sangat cepat saat terjadi audit.

Kendati efisiensi waktu pelaporan dan akurasi hitungan membaik, penerapan sistem digital ini masih diwarnai oleh kelemahan pada poin keterlambatan entri data (poin 3 pada Tabel 3). Keterbatasan literasi dan ketiadaan staf khusus membuat input data ke sistem kerap ditunda hingga dua atau tiga hari setelah transaksi, yang mengindikasikan bahwa prosedur operasional standar (SOP) pencatatan harian belum dijalankan secara disiplin.

Transparansi Internal dan Transparansi Publik

Dalam menganalisis transparansi, peneliti menemukan adanya perbedaan tingkat keberhasilan antara transparansi internal dan transparansi publik. Secara internal, keterbukaan informasi di dalam organisasi berjalan dengan baik. Staf keuangan, Direktur, maupun Badan Pengawas Desa dapat dengan mudah mengakses dan mengecek kesesuaian data operasional (seperti membandingkan data pengunjung pada Tabel 2 dengan perolehan kas) secara real-time di komputer utama. Namun, kemudahan akses di tingkat internal ini pada dasarnya lebih mencerminkan efektivitas administrasi. Sebaliknya, pada tataran transparansi publik, BUMDes Karya Maju Cemerlang belum memiliki wadah atau platform digital yang memublikasikan laporan kinerja kepada masyarakat luas. Tidak ada website resmi, media sosial interaktif, maupun dashboard desa yang dapat diakses publik untuk melihat pelaporan keuangan atau

operasional. Hal ini ditegaskan oleh Direktur BUMDes: "Kalau untuk orang dalam dan pengawas dari desa, data itu sangat terbuka dan gampang kita perlihatkan. Tapi kalau untuk warga umum yang mau lihat laporan keuangan BUMDes secara online, kita memang belum punya website atau media sosial khusus ke arah sana," kata Bapak Muhammad Zakaria. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara operasional transparansi digital kepada publik belum terwujud.

Akuntabilitas Administratif dan Keuangan

Dalam konteks pertanggungjawaban, penelitian ini memfokuskan evaluasi pada akuntabilitas administratif dan keuangan, mengingat data spesifik mengenai target dan realisasi capaian usaha BUMDes belum sepenuhnya terdigitalisasi maupun tersedia untuk dianalisis secara komprehensif. Pada batasan aspek ini, implementasi sistem digital terbukti sangat mendukung proses pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes kepada pemerintah desa. Ketersediaan jejak digital (digital record) berupa rekapitulasi data di Excel dan arsip foto nota transaksi mempermudah kelengkapan arsip serta proses pembuktian transaksi tanpa harus mencari dokumen fisik yang rawan hilang. "Bukti transaksi sekarang selain fisik juga kita kumpulkan dalam folder digital di komputer. Jadi, kalau tiba-tiba ada pemeriksaan atau audit rutin dari desa, pencarian buktinya sangat cepat, tidak perlu lagi membongkar tumpukan kardus arsip tahun-tahun sebelumnya," jelas Saudari Maria Omia.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa meskipun evaluasi pencapaian kinerja usaha secara menyeluruh belum dapat diukur, digitalisasi telah berhasil mewujudkan akuntabilitas pengelolaan yang baik dari sisi tertib administrasi dan pengamanan bukti keuangan.

Kendala dan Kegagalan Penggunaan Sistem

Meskipun memberikan sejumlah kemudahan, observasi di lapangan menunjukkan bahwa digitalisasi tidak sepenuhnya berjalan mulus. Terdapat kelemahan terkait kedisiplinan dan literasi digital pengguna. Pengentrian data tidak selalu dilakukan secara real-time. Pada saat operasional unit usaha sedang ramai (khususnya akhir pekan), pencatatan ke dalam sistem sering kali tertunda. "Kendalanya ya di tenaga dan waktu. Kadang kalau pas akhir minggu dan pengunjung lagi ramai-ramainya, saya kewalahan. Data akhirnya baru bisa saya input manual ke Excel dua atau tiga hari setelahnya. Saya juga pernah tidak sengaja salah masukan rumus atau menghapus kolom karena memang belum terlalu mahir pakai aplikasinya," tambah Maria Omia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada kompetensi individu masih tinggi, dan kesalahan (human error) dalam pengoperasian aplikasi masih terjadi akibat keterbatasan literasi digital.

Pembahasan

Berdasarkan indikator efektivitas Steers (dalam Nayanti dkk., 2025), penerapan sistem digital di BUMDes Karya Maju Cemerlang menunjukkan pencapaian yang bervariasi. Pada indikator pencapaian tujuan, Sistem membantu meningkatkan efisiensi administrasi dengan mengurangi waktu penyusunan laporan. sejalan dengan temuan (Pratiwi & Sujana, 2024). Namun, indikator integrasi belum sepenuhnya tercapai karena pengentrian data kerap tertunda saat operasional padat, menunjukkan belum adanya sinkronisasi real-time. Pada indikator adaptasi, kendala teknis akibat rendahnya literasi digital staf memperluas temuan (Salindeho dkk., 2026) yang menegaskan bahwa infrastruktur teknologi akan gagal tanpa pelatihan SDM yang konsisten. Terkait asas transparansi (Mardiasmo, dalam Mais dkk., 2024), temuan lapangan mengoreksi asumsi studi terdahulu seperti (Aprillianto dkk., 2022) dengan memperlihatkan adanya disparitas nyata. Transparansi internal telah terwujud melalui kemudahan akses pengurus dan pengawas terhadap data rekapitulasi digital, namun transparansi publik belum optimal akibat ketiadaan medium publikasi seperti website atau media sosial resmi BUMDes.

Digitalisasi juga berkontribusi dalam memperkuat prinsip akuntabilitas (Mahmudi, dalam Mais dkk., 2024)). Klaim ini didukung oleh ketersediaan folder arsip digital berupa dokumen spreadsheet dan foto nota transaksi harian yang membantu mempercepat proses mempermudah persiapan dokumen ketika dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Desa, sekaligus sejalan dengan temuan (Dewi & Yasa, 2025) mengenai pentingnya jejak digital sebagai landasan pertanggungjawaban. Terlepas dari temuan tersebut, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Evaluasi hanya dilakukan pada satu BUMDes dengan melibatkan dua informan internal, sehingga penilaian mengenai ketiadaan transparansi publik murni didasarkan pada ketiadaan platform aplikasi, bukan dari keluhan langsung informan unsur masyarakat luas. Selain itu, analisis pada data historis operasional pengunjung tahun 2024 rentan terhadap bias kelengkapan data karena pencatatan tersebut berasal dari metode manual yang baru dimigrasikan ke dalam sistem digital pada tahun 2025, sehingga membatasi validitas komparasi antarperiode secara utuh.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem digital di BUMDes Karya Maju Cemerlang telah memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas tata kelola organisasi, meski implementasinya belum berjalan optimal secara menyeluruh. Dari segi efektivitas administrasi, sistem ini berhasil mempercepat proses penyusunan laporan dan meminimalkan kesalahan pencatatan manual. Pada aspek transparansi, digitalisasi telah mendukung terwujudnya keterbukaan di ranah internal (bagi pengurus dan pengawas desa).namun belum menyentuh tataran transparansi publik akibat tidak adanya instrumen publikasi. Pada aspek akuntabilitas, Ketersediaan rekam jejak arsip digital membantu mempermudah prosedur audit dan pertanggungjawaban. Meskipun demikian, implementasi sistem ini masih menghadapi sejumlah kendala utama. yakni rendahnya literasi digital pengguna yang memicu kesalahan teknis pengoperasian aplikasi, serta seringnya terjadi penundaan entri data saat beban operasional harian sedang tinggi.

Keterbatasan

Terlepas dari temuan tersebut, penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Evaluasi hanya dilakukan pada satu BUMDes dengan melibatkan dua informan internal, sehingga penilaian mengenai ketiadaan transparansi publik murni didasarkan pada ketiadaan platform aplikasi, bukan dari keluhan langsung informan unsur masyarakat luas. Selain itu, analisis pada data historis operasional pengunjung tahun 2024 rentan terhadap bias kelengkapan data karena pencatatan tersebut berasal dari metode manual yang baru dimigrasikan ke dalam sistem digital pada tahun 2025, sehingga membatasi validitas komparasi antarperiode secara utuh.

Saran

Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian ini merekomendasikan serangkaian langkah operasional. Pertama, pengurus BUMDes perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) baku yang mewajibkan penginputan transaksi secara real-time (selambat-lambatnya pada akhir hari kerja) guna mencegah penumpukan data. Kedua, perlu dilakukan penetapan jadwal pelatihan teknis penggunaan aplikasi secara berkala, pembagian hak akses (user access rights) yang jelas antara kasir dan manajemen, serta penerapan prosedur pencadangan (backup) data ke sistem cloud setiap minggu untuk menjaga keamanan arsip dari risiko kerusakan perangkat.

Ketiga, guna mewujudkan transparansi publik secara utuh, BUMDes harus segera menyediakan media publikasi yang terintegrasi, seperti pembuatan media sosial resmi atau penayangan ringkasan laporan keuangan dan kinerja operasional bulanan pada website desa, sehingga cita-cita tata kelola yang baik (good governance) dapat terwujud untuk menopang keberlanjutan ekonomi desa.

REFERENSI

- Aprillianto, B., Maharani, B., Sayekti, Y., Irmadariyani, R., Indah Purnamawati, I., & Sulistiyo, A. B. (2022). A Menuju Tata Kelola Bumdes Yang Baik Melalui Digitalisasi Dan Konsolidasi Laporan Keuangan. *Jurnal Abdi Panca Marga*, 3(2), 55–60. <https://doi.org/10.51747/abdipancamarga.v3i2.999>
- Dewi, L. T. S., & Yasa, I. N. P. (2025). Mengungkap Akuntabilitas Penerapan Digitalisasi Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes pada BUMDes Tunjung Mekar Desa Tunjung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 15(1), 137–147.
- Mais, R. G., Nuryati, T., Sakti, S. H., & Lestari. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 4(2), 140–158. <https://doi.org/10.24853/jago.4.2.140-158>
- Nayanti, D., Affrian, R., & Sugianor, S. (2025). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Balida Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan. *Jurnal Keuangan Daerah, Pusat Dan Kearsipan*, 2(1), 56–65.
- Pratiwi, P. P. R. C., & Sujana, E. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Pengawasan Keuangan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Bumdes Se-Kecamatan Busungbiu. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi (VJRA)*, 13(3), 36–48.
- Sadiyah, K., & Ibrahim. (2026). Antara laporan dan kehidupan: Kajian institusional atas akuntabilitas Bumdes di era digital. *Jurnal Manajemen Inovasi Terapan*, 2(1), 7–14. <https://doi.org/10.37373/ejm.v2i1.2178>
- Salindeho, A., Gazali, A., & Pesak, P. J. (2026). Pertumbuhan Desa Wisata: Digitalisasi BUMDes, Transparansi Laporan Keuangan, Kualitas Sumber Daya Manusia. *SOLUSI: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 24(2), 192–212. <https://doi.org/10.26623/slsi.v24i2.14065>
- Setiawati, E., Lauwinata, L., Phoek, S. E. M., & Riyanto, P. (2026). PENGUATAN Tata Kelola Keuangan Dan Akuntabilitas Bumdes Melalui Implementasi Sistem Administrasi Dan Pelaporan Keuangan Berbasis Digital. *Falsafa: Jurnal Multidisiplin Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(7).
- Sriyanto, & Widiyahseno, B. (2025). Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Village: Journal Rural Development and Government Studies*, 5(1), 25–31.
- Zulpan, Sutrisno, Niami, S., Hendri, Z., Rahmany, S., & Wiharto, S. (2025). Inklusi Digitalisasi Keuangan Untuk Penguatan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Kuala Alam: Strategi Pemberdayaan Berbasis Teknologi. *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 134–139. <https://doi.org/10.61722/japm.v3i3.4617>